



Catatan-catatan terkait pemindahan IKN dan pemerataan pembangunan

Prof. Arief Anshory Yusuf



DISAMPAIKAN PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DPR
PANSUS RUU TENTANG IBU KOTA NEGARA - 12 DESEMBER 2021



Isu pemerataan pembangunan dalam RUU dan Naskah Akademik

Poin dalam RUU/NA	Keterangan
Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. [...] Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia	Penjelasan atas RUU/Umun, Paragraph 2
[...] ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain	Naskah Akademik, Pendahuluan, Latar belakang (halaman 5)
Berdasarkan kajian pada Dokumen Pre-Masterplan, Kalimantan Timur memiliki tiga tujuan yang terkait pertumbuhan sektor ekonomi. Tujuan pertama adalah menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, lewat layanan bernilai tambah yang mendukung gelombang pertumbuhan ekonomi berikutnya bagi Indonesia Timur.	Naskah Akademik, halaman 86.

Literatur ilmiah tentang apakah pemindahan-pemindahan IKN ini berhasil mencapai tujuannya?

Catatan: Naskah akademik sebaiknya banyak mengacu pada peer-review journals. Ini akan meningkatkan kredibilitas dari proposal pemindahan IKN

Motivasi Pemindahan IKN di Negara Lain

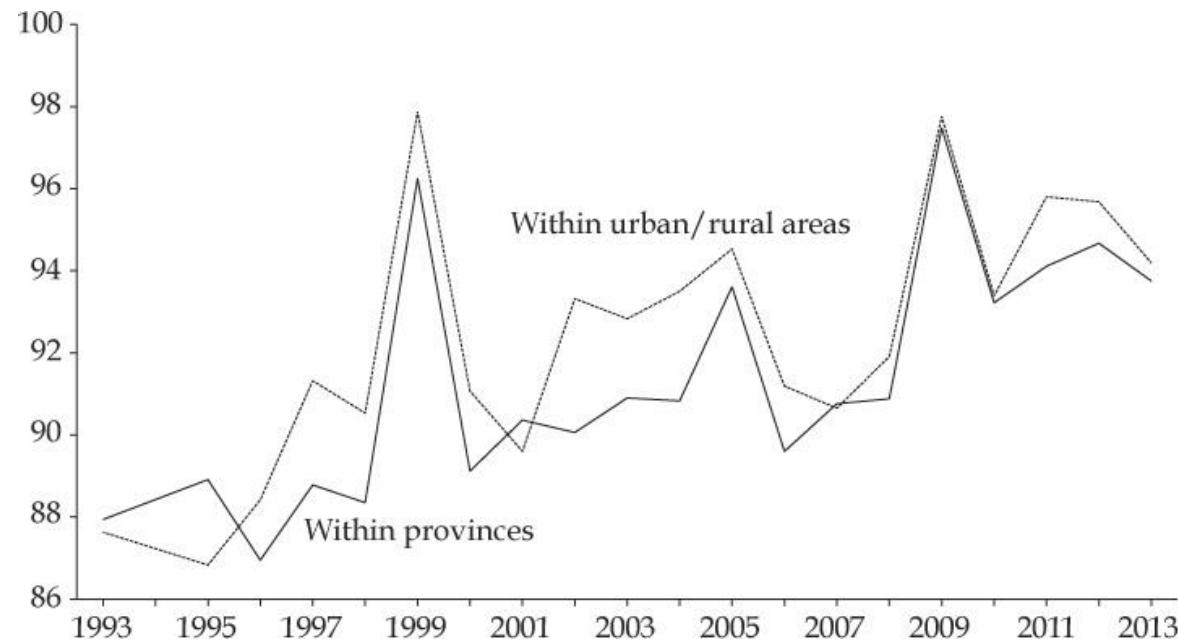
Negara	Ibu Kota Lama	Ibu Kota Baru	Permasalahan Ibu Kota Sebelumnya	Pemerataan Pembangunan Nasional	Penguatan Identitas Bangsa	Isu Sosial Politik/Pertahanan
Malaysia	Kuala Lumpur	Putra Jaya	✓		✓	
Korea Selatan	Seoul	Sejong	✓	✓		✓
Brazil	Rio de Janeiro	Brasilia	✓	✓	✓	
Australia	Melbourne	Canberra	✓		✓	
Kazakhstan	Almaty	Astana	✓		✓	✓
Myanmar	Yangon	Naypyidaw	✓	✓	✓	✓
Amerika	New York	Washington DC	✓		✓	
Nigeria	Lagos	Abuya	✓	✓		✓
Pakistan	Karachi	Islamabad	✓	✓	✓	✓

Isu pemerataan di Indonesia

- Ketimpangan ada dua kategori: vertical dan horizontal
- Koefisien Gini (vertical) secular trend-nya meningkat
- Ketimpangan bisa didekomposisi menjadi kontribusi between-regions and within-regions inequality.
 - Hanya sekitar 5% ketimpangan di Indonesia dikontribusi oleh ketimpangan antar-provinsi. Artinya menghilangkan 100% ketimpangan antar daerah masih menyisakan 95% ketimpangan. Semua daerah di Indonesia mengalami kenaikan ketimpangan. Ini terkait dengan isu transformasi struktural yang tidak sehat.
- Seberapa besar pemindahan IKN bisa meningkatkan pemerataan pembangunan?
 - Tergantung seberapa besar bisa meng-address ketimpangan antar daerah, tapi yg lebih penting ketimpangan within-regions.
- Apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat dampak pemindahan IKN untuk meningkatkan pemerataan pembangunan?

Hanya sekitar 5% ketimpangan di Indonesia dikontribusi oleh ketimpangan antar-provinsi. Artinya menghilangkan 100% ketimpangan antar daerah masih menyisakan 95% ketimpangan. **Pembangunan IKN juga perlu meng-address yg 95% ini.**

FIGURE 7 Share of Inequality (Generalised Entropy) Explained by Within-Region Inequality, 1993–2013 (%)



Yusuf, A. A., Sumner, A., & Rum, I. A. (2014). Twenty years of expenditure inequality in Indonesia, 1993–2013. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 243-254.

Isu pemindahan IKN

- Long-run (analisis juga jangka panjang, focus pada operasionalnya bukan konstruksi-nya)
- Pemerataan apa yang ingin dikurangi? Vertikal? Horizontal? Antar daerah: Jawa-luar Jawa, KTI non KTI?
- Seberapa besar dampaknya? Apakah berpotensi mencapai tujuannya meningkatkan pemerataan pembangunan
- Kalau kurang potensial, apa hal lain yang perlu dilakukan?

Analisis dampak ekonomi pemindahan IKN

- Oleh Prof. Arief Anshory Yusuf (UNPAD) & Prof. John Mark Horridge (Victoria University)
- Menggunakan model inter-regional CGE IndoTERM:
- Model berbasis data Input-Output Tabel, IRIO terbaru (2016, rilis 2020) dan berbagai data lainnya.
- Long-run impact, operasional phase
- Asumsi: Aktivitas ekonomi sektor pemerintahan pusat di provinsi DKI Jakarta adalah 75%, 25% aktivitas Pemprov DKI. Ini equivalen dengan meningkatkan aktivitas sektor pemerintahan umum di Kaltim 9 kali lipat.
- Catatan: *Ceteris Paribus*, hanya dampak mengalihkan aktivitas pemerintahan pusat dari DKI ke Kaltim. Tidak ada kebijakan-kebijakan lain.

IndoTERM CGE Model

- A bottom-up inter-regional computable general equilibrium model of the Indonesian economy
- A family of Australian TERM The Enormous Regional Model Developed by CoPS (Centre of Policy Studies), Victoria University (formerly: Monash University)
- Applied in:
 - Australia, Brazil, Finland, China, South Africa, Indonesia
- In Indonesia
 - Emerald (Pambudi)
 - IndoTERM v.1 (CEDS UNPAD, CoPS, 2006)
 - IndoTERM v.2 (ADB, CoPS, CEDS UNPAD, 2012)
 - IndoTERM v.3 - Dynamic (CoPS, CEDS UNPAD, BAPPENAS, AusAID, 2013-2014)
 - IndoTERM v.4 – 2010 data (CoPS, CEDS UNPAD, BAPPENAS, ADB, 2016)
 - IndoTERM v.5 – 2016 data (CoPS, CEDS UNPAD, BAPPENAS, USAID, 2021)
- A result of years of collaboration among these institutions:



IndoTERM

is an inter-regional, bottom-up,
computable general equilibrium (CGE) model

of the Indonesian economy

A large system of non-linear equation solved by specialized software (Gempack)

Cover the whole national economy, generating standard macroeconomic variables

Regions are connected through inter-regional trade of commodities and factors

Each region is modeled as a separate economy, prices are different across regions.

Multi markets
185 COM
34 REG
185 IND
9 LAB
1 CAP
1 LND

Aplikasi dan dokumentasi IndoTERM CGE Model



Books Journals Digital Resources About Contact

Home | Asian Development Review | List of Issues | Volume 35 , No. 2 | Indonesia's Moratorium on Palm Oil Expansion from Natural Forests: Economy-Wide Impacts and the Role of International Transfers



Asian Development Review

Volume 35 • 2018 • Number 2

Special Issue on The Climate Change Challenge to Asia's Development
• Green Growth and Moratorium Evidence from 16 Asian Countries
• Driver Decisions
• Optimal Carbon Pricing and the Case for Policy Reform in Asia?
• Optimal Carbon Pricing and the Case for Policy Reform in Asia?
• Pollution in Chinese Cities
• Implications of the Health Effects of Reducing Fine Particulate Matter on Economic Growth
• Indonesia's Moratorium on Palm Oil Expansion from Natural Forests: Economy-Wide Impacts and the Role of International Transfers
• Arief A. Yusuf, Elizabeth L. Roos and Jonathan M. Horridge



Sustainable Production and Consumption

Volume 28, October 2021, Pages 391-404



Effect of COVID-19 on energy consumption and carbon dioxide emissions in Indonesia

Djoni Hartono ^{a, b} , Arief Anshory Yusuf ^c, Sasmita Hastri Hastuti ^b, Novani Karina Saputri ^b, Noor Syaifudin ^d

Show more ▾

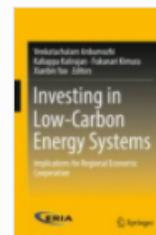
+ Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.06.003>

Get rights and content

Abstract

Despite the pandemic's negative effect on the economy, it can help reduce emissions from energy consumption activities in line with the Paris Agreement, especially for high-emitter countries such as Indonesia. However, the policy response to COVID-19 may rebound the emissions to their pre-pandemic levels. To design an efficient



[Investing on Low-Carbon Energy Systems pp 79-109](#) | [Cite as](#)

Toward a Low-Carbon Economy for Indonesia: Aspirations, Actions and Scenarios

Authors

Arianto A. Patunru , Arief Anshory Yusuf

Authors and affiliations



ORIGINAL ARTICLE

The impact of Industry 4.0 on the Indonesian economy: A general equilibrium assessment

Arief Anshory Yusuf

First published: 04 August 2021 | <https://doi.org/10.1111/rsp3.12463>

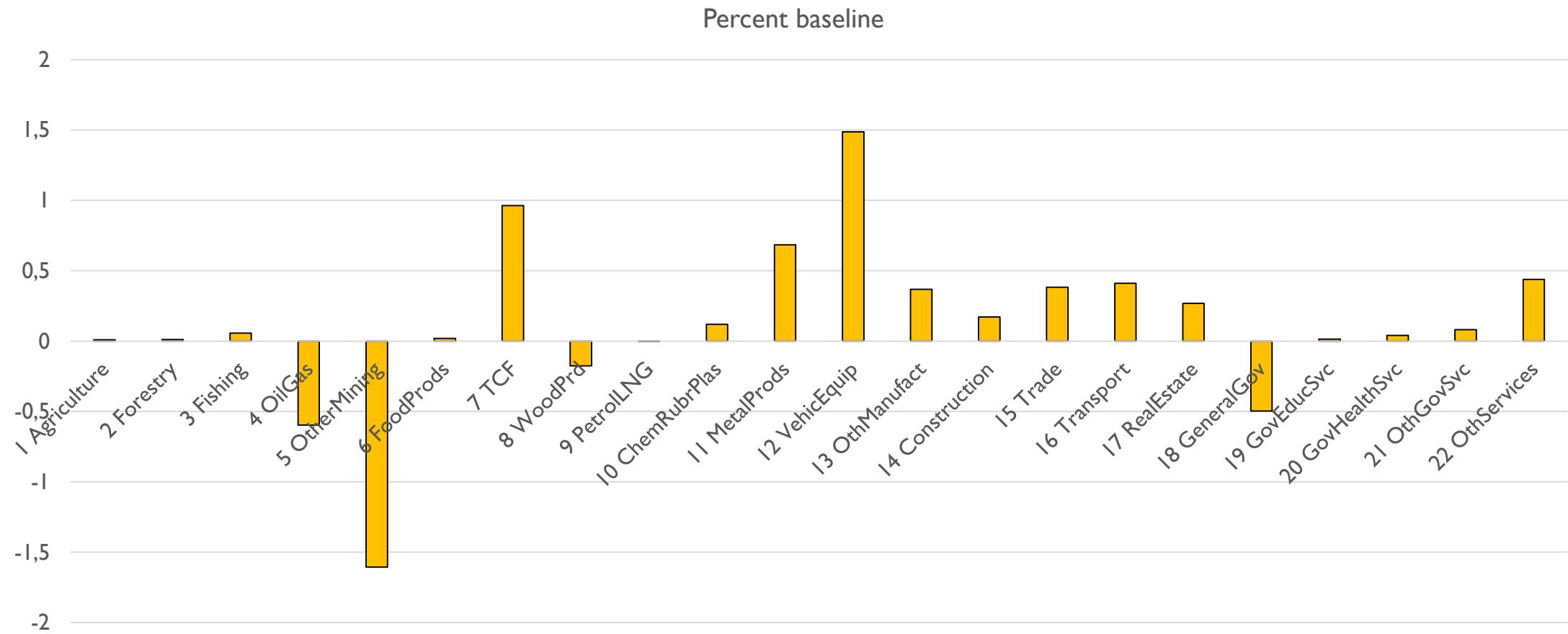
[Read the full text >](#)

PDF TOOLS SHARE

Abstract

Using a recursive-dynamic multiregional computable general equilibrium (CGE) modelling approach, we introduced a set of sector-specific labour productivity shocks representing the effect of Industry 4.0 on the Indonesian economy. The results suggest that Indonesia's long-term economic growth will increase from 5.2% per year to 5.7% per year. In terms of output expansion, the top gainer would be the machinery and motor

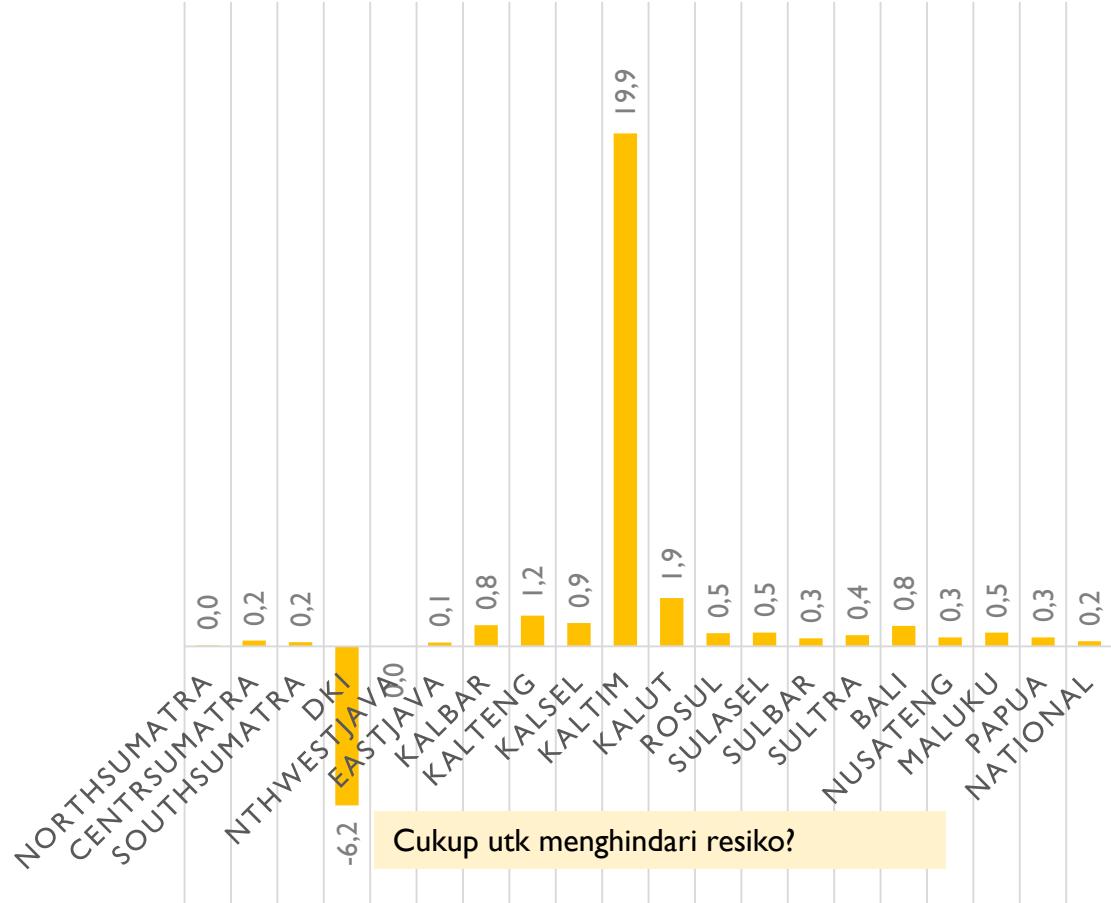
Pemindahan IKN ke Kaltim sedikit menambah pertumbuhan ekonomi nasional (PDB impact hanya 0.2%) tapi berpotensi membantu transformasi struktural secara nasional.



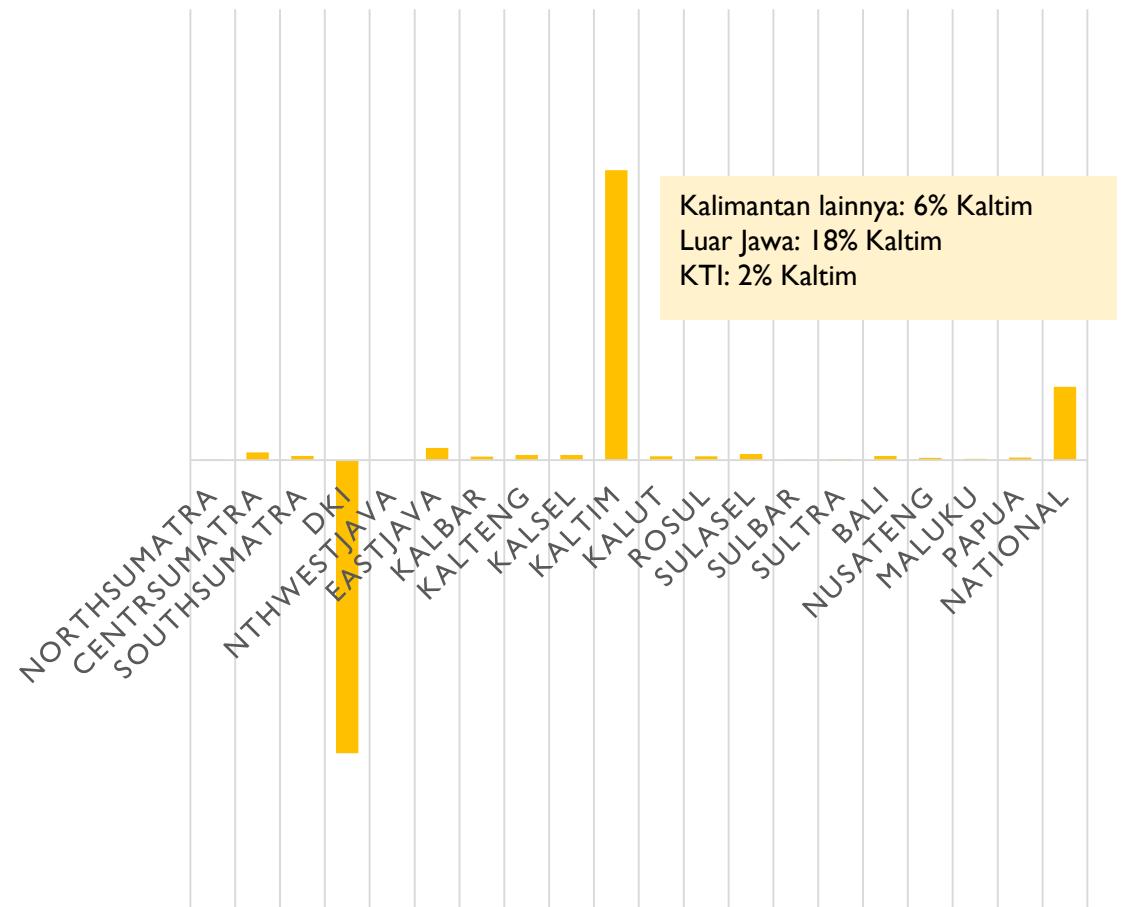
Sumber: Simulasi IndoTERM

Seberapa besar bisa meningkatkan pemerataan pembangunan?

PDRB (% FROM BASELINE)



LEVEL (NOMINAL)



Sumber: Simulasi IndoTERM

Dampak perdaganagn antar daerah dari pemindahan IKN

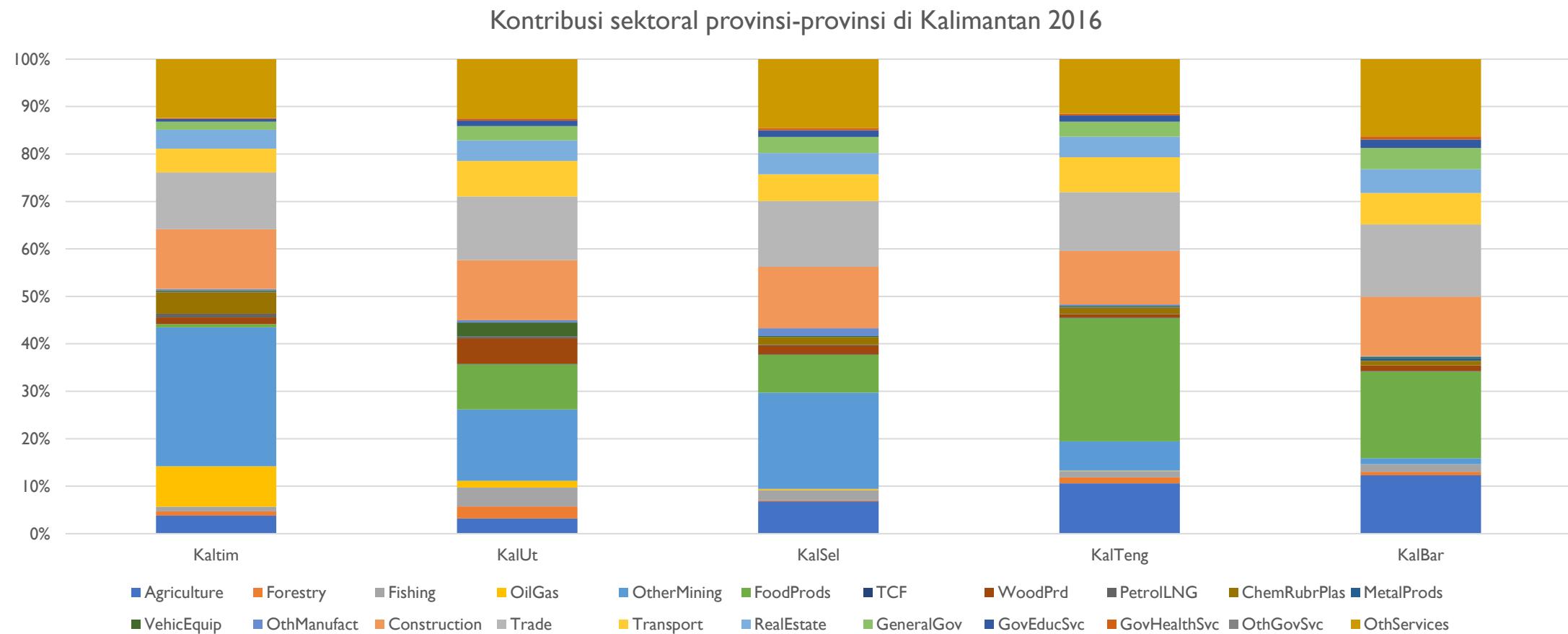
Kode - c [dom +*]	Percent dari baseline																		
	1 North Sumatra	2 Centr Sumatra	3 South Sumatra	4 DKI	5 Nth West Java	6 East Java	7 KalBar	8 KalTeng	9 KalSel	10 KalTim	11 KalUt	12 RoSul	13 SulSel	14 SulBar	15 SulTra	16 Bali	17 Nusa Teng	18 Maluku	19 Papua
1 North Sumatra	-0.1	0.0	-0.1	-4.4	-0.4	0.1	1.3	1.8	1.5	21.8	2.7	0.7	1.2	0.8	0.7	1.0	0.6	0.7	0.5
2 Centr Sumatra	0.0	0.0	-0.1	-5.2	-0.4	0.1	1.4	2.0	1.6	14.6	3.5	0.7	1.2	0.8	1.0	1.1	0.7	0.9	0.2
3 South Sumatra	0.3	0.3	0.1	-4.2	0.0	0.5	1.8	2.4	1.9	13.3	4.0	1.1	1.5	1.2	1.3	1.4	1.1	1.4	0.5
4 DKI	4.5	4.6	4.1	-10.1	3.6	4.6	5.6	6.3	5.6	42.0	7.4	5.4	5.8	5.1	5.4	5.6	5.1	5.2	4.9
5 Nth West Java	0.0	0.4	0.0	-3.2	0.0	0.3	1.3	2.0	1.6	28.3	3.3	1.0	1.2	0.8	0.9	1.1	0.6	1.0	0.6
6 East Java	-0.1	-0.1	-0.2	-4.4	-0.5	0.0	1.3	1.9	1.5	19.9	3.2	0.8	1.2	0.8	0.9	0.9	0.6	0.8	0.4
7 KalBar	-1.0	-1.1	-1.6	-5.6	-1.5	-1.4	0.6	1.0	0.2	22.8	1.7	-0.6	-0.3	-0.7	-0.7	-0.6	-0.8	-0.7	-0.8
8 KalTeng	-0.8	-1.0	-1.5	-5.8	-1.3	-1.4	0.4	0.9	0.5	22.8	2.0	-0.6	-0.1	-0.7	-0.2	-0.5	-0.7	-0.8	-0.9
9 KalSel	-0.8	-0.7	-1.4	-5.4	-0.2	-0.3	0.2	0.7	0.4	26.7	1.8	-0.2	1.7	-0.4	-0.2	0.5	-0.7	-0.5	-0.7
10 KalTim	-8.8	-7.6	-7.3	-11.0	-5.8	-5.3	-10.9	-9.4	-11.3	32.1	-6.9	-8.1	-6.1	-9.0	-8.5	-7.3	-9.2	-10.4	-11.5
11 KalUt	-2.0	-1.8	-2.2	-7.3	-1.7	-2.3	-0.9	-1.6	-2.3	24.6	1.2	-1.1	1.1	-0.3	-0.1	-1.1	-1.8	-1.8	-1.5
12 RoSul	-0.6	-0.7	-1.1	-6.5	-1.0	-0.6	0.9	0.9	1.1	25.5	2.4	0.2	0.8	0.3	-0.1	0.4	-0.2	0.2	0.0
13 SulSel	-1.1	-1.1	-1.2	-6.4	-1.5	-1.1	0.5	1.0	0.2	27.2	1.9	-0.4	0.3	-0.1	-0.2	-0.1	-0.6	-0.1	-0.2
14 SulBar	-0.5	-0.5	-0.6	-6.7	-1.0	-0.4	1.1	1.3	0.7	21.0	2.1	0.1	0.5	0.2	0.0	0.5	-0.2	0.1	0.0
15 SulTra	-0.2	-0.4	-0.7	-6.7	-0.5	-0.2	1.4	1.2	0.6	21.6	1.8	-0.1	0.1	-0.1	0.3	0.5	-0.3	0.0	-0.2
16 Bali	-0.6	-0.5	-0.5	-9.8	-0.7	-0.4	0.6	1.2	0.8	38.4	2.5	0.2	0.4	0.1	0.1	0.4	-0.2	0.3	0.1
17 Nusa Teng	-0.2	-0.1	-0.5	-5.7	0.0	0.0	0.8	1.2	0.8	23.9	2.6	0.5	0.9	0.4	0.5	0.6	0.2	0.4	0.2
18 Maluku	-0.1	0.0	-0.5	-5.9	-0.2	0.1	1.9	1.3	0.8	45.1	2.9	0.5	1.0	0.6	0.6	1.0	0.2	0.4	0.2
19 Papua	0.7	0.5	-0.1	-4.9	0.6	0.5	1.6	1.3	0.9	80.7	2.5	0.8	2.9	0.9	1.4	1.5	0.7	0.3	0.2
Level change (Nominal)																			
1 North Sumatra	-691.3	-0.5	-31.7	-1,168.0	-124.5	78.5	49.4	40.7	70.0	1,371.0	23.5	14.9	19.7	1.7	3.8	22.7	12.4	9.5	17.9
2 Centr Sumatra	-2.8	681.8	-34.7	#####	-298.0	122.8	152.2	135.6	180.7	4,920.2	121.6	98.7	145.6	9.2	33.7	76.4	58.9	44.1	48.2
3 South Sumatra	94.6	262.9	712.1	#####	-40.7	220.6	92.1	92.4	93.0	2,478.9	72.7	72.2	91.0	5.4	21.0	45.6	40.9	27.5	48.0
4 DKI	1,352.9	3,005.6	2,160.4		7,561.1	4,332.2	359.1	455.0	549.1	9,863.5	332.3	546.2	665.1	79.4	165.9	304.6	455.1	210.4	510.0
5 Nth West Java	5.3	616.9	-21.4	#####	-1,144.1	981.5	172.1	262.9	294.7	#####	236.6	221.7	358.6	24.1	69.7	192.2	137.1	90.0	156.9
6 East Java	-73.7	-93.1	-140.1	#####	#####	580.1	215.9	514.6	354.9	#####	245.6	221.7	421.9	31.5	76.4	268.1	170.7	78.1	112.6
7 KalBar	-82.2	-151.8	-67.2	-311.3	-78.0	-87.6	1,000.2	35.1	4.4	1,995.0	38.8	-13.4	-4.4	-1.7	-3.5	-5.2	-11.0	-4.9	-15.9
8 KalTeng	-60.8	-96.0	-58.6	-287.1	-68.3	-329.1	10.0	1,351.9	31.6	3,173.6	52.7	-25.7	-3.7	-3.7	-0.8	-12.3	-17.7	-13.0	-33.5
9 KalSel	-29.0	-43.3	-25.9	-383.4	-17.8	-36.7	5.1	49.6	1,056.9	2,708.5	20.8	-3.4	50.4	-1.0	-0.9	6.0	-11.5	-2.6	-10.3
10 KalTim	-1,018.3	#####	-435.8	#####	#####	#####	#####	-509.5	-357.9	-727.6	-331.9	-543.5	-720.2	-49.8	-131.5	-211.0	-330.5	-125.4	-426.0
11 KalUt	-22.4	-40.1	-23.8	-156.6	-70.0	-129.1	-18.3	-25.9	-84.9	2,314.7	948.7	-9.4	9.4	-0.2	-0.1	-5.3	-10.5	-6.7	-7.4
12 RoSul	-20.7	-36.0	-32.8	-503.1	-139.0	-119.4	23.6	41.4	41.8	2,007.0	25.5	752.3	63.0	1.9	-4.0	7.0	-3.1	7.9	-1.4
13 SulSel	-63.9	-107.4	-53.4	-731.4	-213.5	-264.6	21.1	101.7	8.8	3,414.7	35.5	-75.6	1,537.5	-5.8	-11.5	-2.5	-25.2	-2.0	-17.5
14 SulBar	-1.3	-2.7	-3.3	-71.2	-19.2	-11.1	5.3	12.0	3.7	179.8	2.2	1.4	19.9	75.6	0.2	1.4	-0.3	0.1	0.0
15 SulTra	-2.6	-7.2	-5.9	-216.0	-24.5	-8.4	13.0	13.6	6.8	651.6	6.0	-5.7	10.7	-0.6	261.5	4.6	-3.3	0.2	-2.7
16 Bali	-21.0	-26.7	-26.5	-348.8	-95.6	-89.4	7.3	25.7	23.4	1,999.4	23.9	3.4	9.2	0.4	1.1	978.8	-6.7	3.7	5.3
17 Nusa Teng	-9.4	-3.2	-12.5	-426.6	1.5	3.0	15.2	40.1	20.1	1,011.8	12.9	7.1	15.7	0.8	3.4	24.9	490.0	3.4	6.3
18 Maluku	-1.7	0.3	-4.3	-244.5	-12.9	5.5	12.1	8.7	5.0	654.5	8.0	5.4	5.1	0.3	1.0	6.8	0.9	416.3	8.8
19 Papua	50.1	59.6	-4.0	-587.1	128.5	90.7	16.5	15.8	8.9	929.4	7.1	12.4	47.3	1.2	10.8	14.1	10.2	4.8	593.7

Sumber: Simulasi IndoTERM

Dampak terhadap distribusi pendapatan fungsional – potensi dampak ketimpangan

% baseline	Upah	Penggunaan	Total pembayaran
Modal	0.21	0.21	0.41
Tenaga kerja	0.20	0.20	0.40
<i>Pertanian</i>	<i>0.15</i>	<i>0.04</i>	<i>0.19</i>
Manual	0.16	0.23	0.39
Clerical	0.15	0.24	0.39
Manajerial	0.14	0.20	0.34

Isu diversifikasi ekonomi

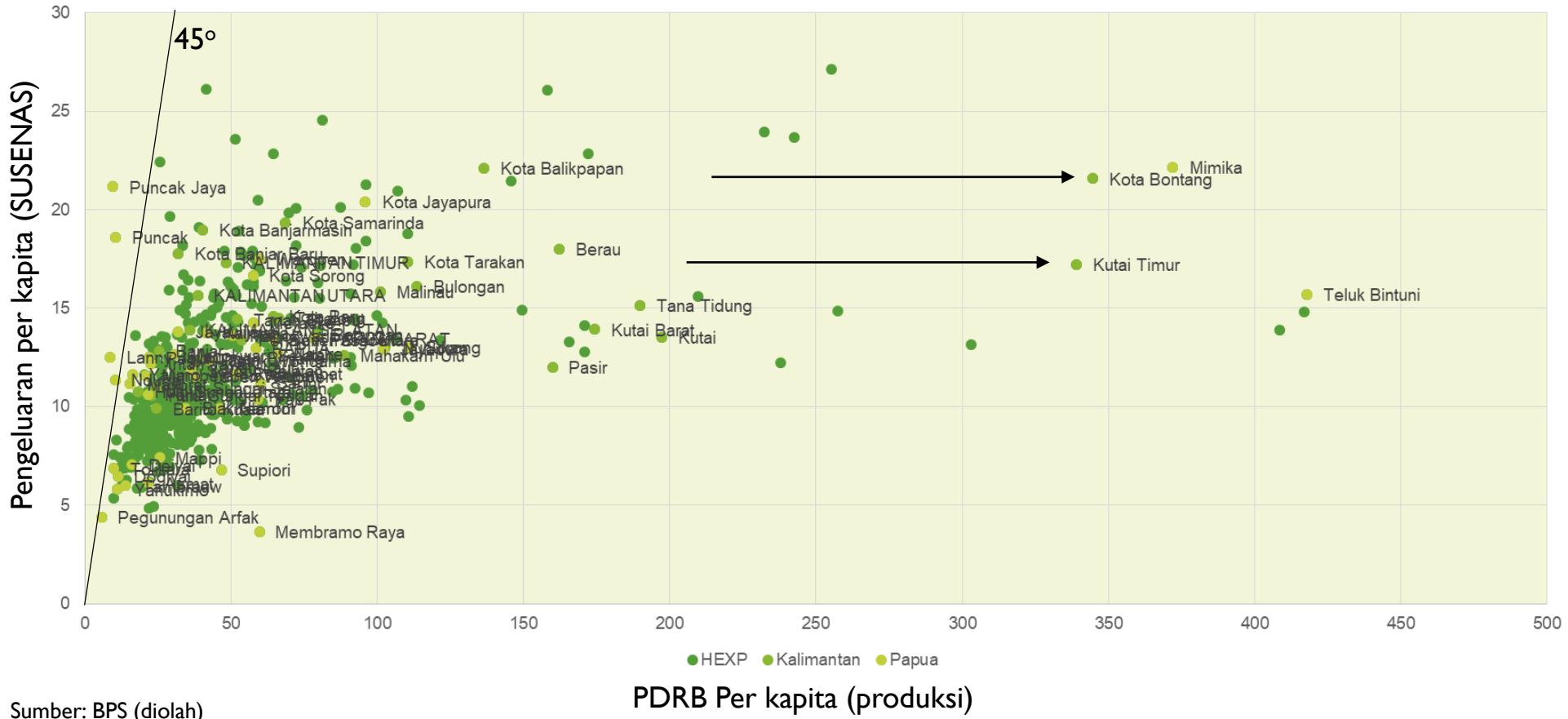


Sumber: Database IndoTERM

Selain DKI mempunyai masalah, KALTIM juga mempunyai problem sendiri. Dibandingkan dengan *benchmark* propinsi-propinsi lain di Indonesia, kinerja Kaltim dalam pembangunan, mengesankan. Tetapi cukup heterogen diantara Kabupaten kota di KALTIM

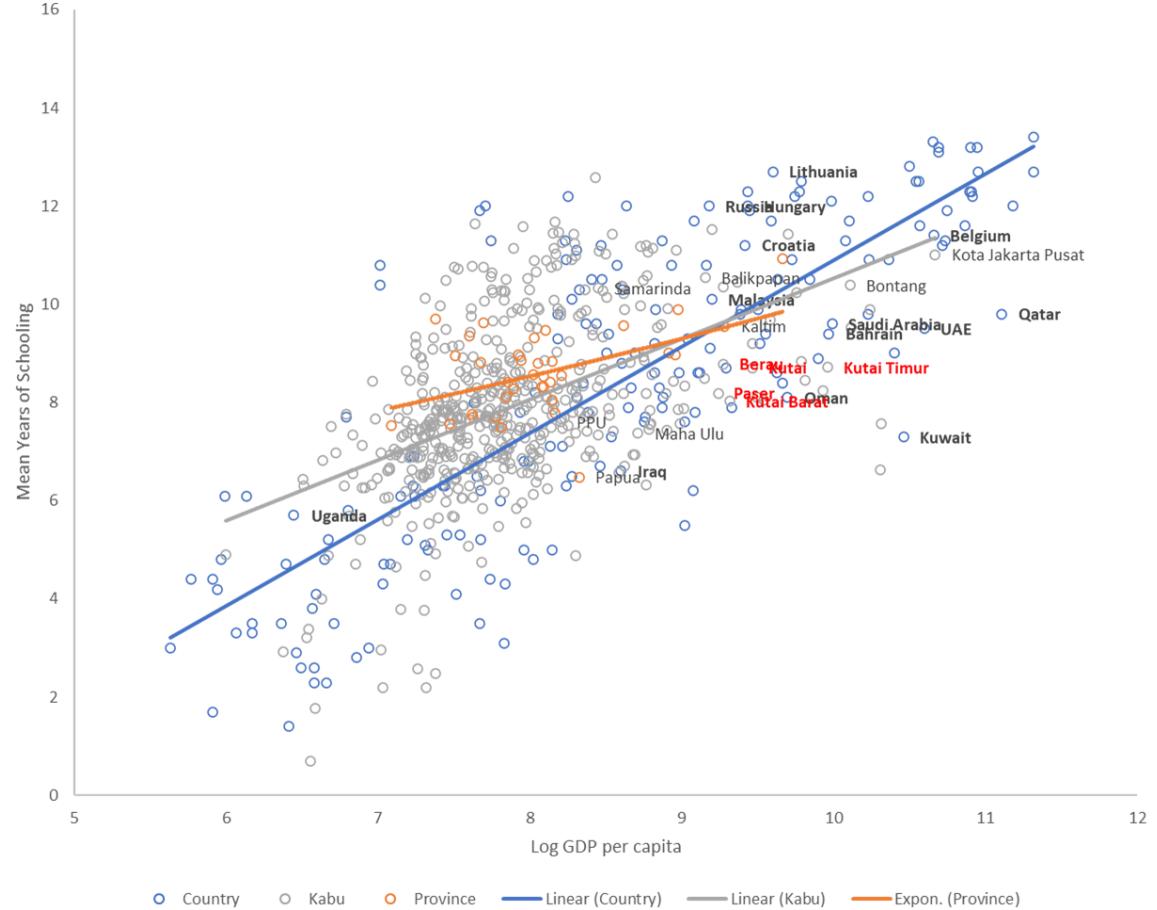
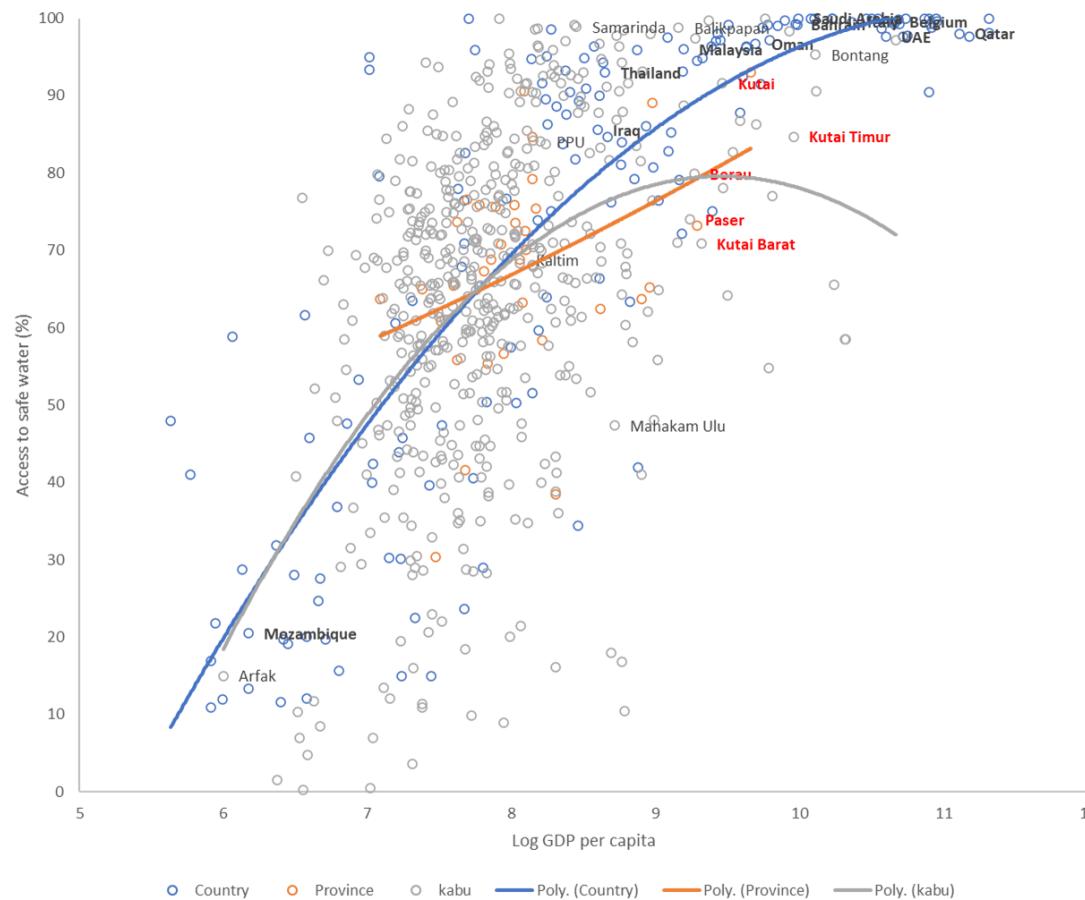
IPM 2019	UHH	RANK	HLS	RANK	RLS	RANK	EXP	RANK	IPM	RANK	RANKING				PERCENTILE						
											UHH	EYS	MYS	EXP	IPM	UHH	EYS	MYS	EXP	IPM	
DKI_JAKARTA	72.79	5	12.97	18	11.06	1	18.527	1	80.76	1	Pasir	95	195	216	203	145	18.4	37.7	41.8	39.3	28.0
DI_YOGYAKARTA	74.92	1	15.58	1	9.38	7	14.394	3	79.99	2	Kutai Barat	84	224	240	274	178	16.2	43.3	46.4	53.0	34.4
KALTIM	74.22	3	13.69	5	9.7	4	12.359	6	76.61	3	Kutai	111	117	141	179	106	21.5	22.6	27.3	34.6	20.5
KEPULAUAN_RIAU	69.8	19	12.83	22	9.99	2	14.466	2	75.48	4	Kutai Timur	80	288	118	201	118	15.5	55.7	22.8	38.9	22.8
BALI	71.99	7	13.27	11	8.84	14	14.146	4	75.38	5	Berau	121	145	131	85	96	23.4	28.0	25.3	16.4	18.6
RIAU	71.48	9	13.14	15	9.03	9	11.255	10	73	6	Penajam Paser Utara	151	313	248	133	162	29.2	60.5	48.0	25.7	31.3
SULUT	71.58	8	12.73	23	9.43	6	11.115	14	72.99	7	Mahakam Ulu	125	320	308	435	347	24.2	61.9	59.6	84.1	67.1
BANTEN	69.84	18	12.88	20	8.74	16	12.267	7	72.44	8	Kota Balikpapan	31	64	41	32	33	6.0	12.4	7.9	6.2	6.4
SUMATERA_BARAT	69.31	22	14.01	3	8.92	12	10.925	17	72.39	9	Kota Samarinda	37	37	49	34	30	7.2	7.2	9.5	6.6	5.8
JAWA_BARAT	72.85	4	12.48	31	8.37	20	11.152	12	72.03	10	Kota Bontang	36	219	37	11	32	7.0	42.4	7.2	2.1	6.2

PDRB Per Kapita vs Pengeluaran Per kapita (2017)



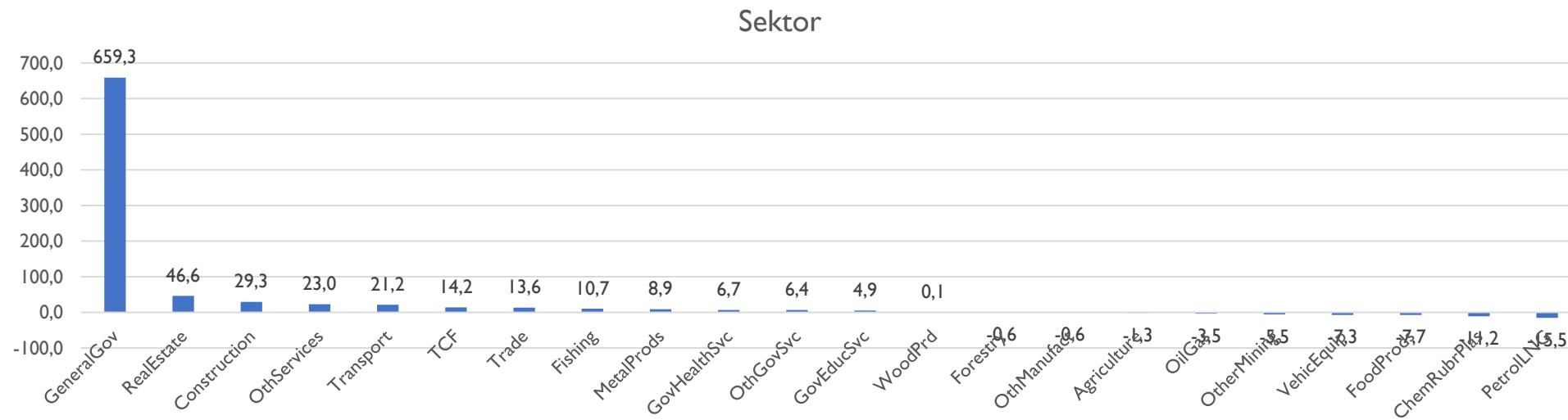
Capital intensive economy (mining, finance) tend to have high spillover of value-added.
Enclave Economy: Sumber ketimpangan di daerah-daerah penghasil SDA. IKN Hindari resikonya.

Akibatnya

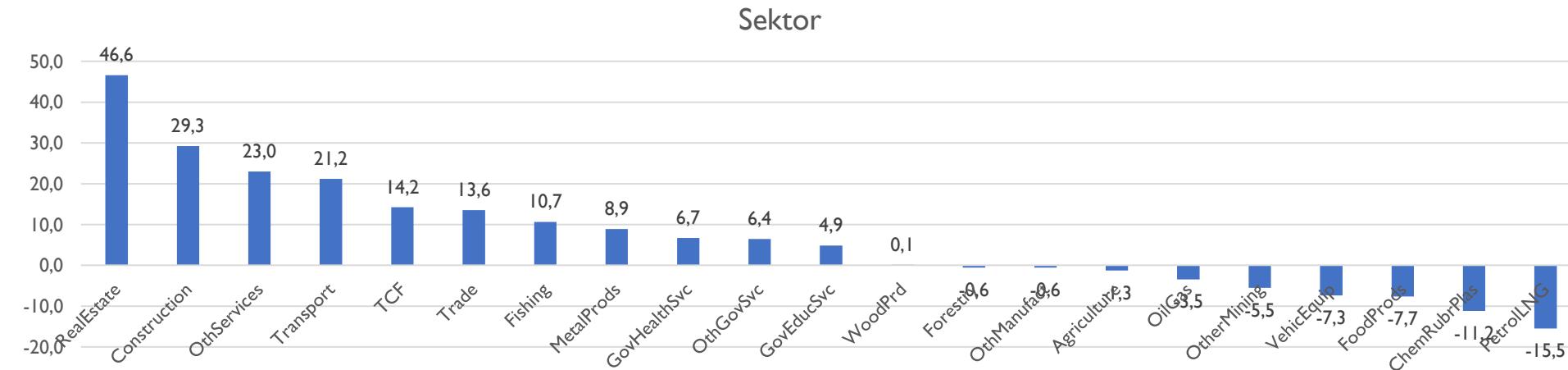


Sumber: BPS (diolah)

Dampak sectoral di Kalimantan Timur



Sektor



Rekomendasi

- Naskah akademik bisa jauh lebih kredibel jika lebih banyak referensinya dan mengacu pada studi-studi ilmiah kredibel (peer-reviewed journals). Terutama dampaknya terhadap tujuan pemerataan pembangunan (atau lainnya)
- Perlu lebih jelas pemerataan pembangunan apa yang ingin dicapai. Vertikal? Antar regional?
- Perlu analisa mendalam tentang potensi peningkatan pemerataan tersebut. Saat ini masih lemah.
- Analisa pemodelan menunjukkan.
 - Dampak makro nasional minimal.
 - Berpotensi mempercepat transformasi struktural.
 - Dampak ekonomi kepada daerah sekitar positif tapi kurang besar.
- Kaltim juga menyimpan beberapa masalah terkait enclave economy. Kalau ini tidak diantisipasi within-region inequality bisa meningkat.
- Harapan pemindahan IKN akan meningkatkan pemerataan pembangunan secara berarti perlu dikaji lebih ilmiah feasibilitasnya. Bagaimanapun juga ini adalah janji yang harus dipenuhi.
- Perlu kebijakan tambahan untuk mengoptimalkan dampak ekonomi IKN diantaranya meningkatkan diversifikasi ekonomi daerah selain IKN (dengan investasi-investasi tambahan, infrastruktur atau lainnya)



Terima Kasih

Prof. Arief Anshory Yusuf

